

# WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM MENJAGA KONSEP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, ANTARA KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI DI ERA OTONOMI DAERAH

Mukhlis<sup>1</sup>, Ahirul Habib Padilah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tanjungpura, [mukhlis@fisip.untan.ac.id](mailto:mukhlis@fisip.untan.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Tanjungpura, [ahirul.habib@fisip.untan.ac.id](mailto:ahirul.habib@fisip.untan.ac.id)

## ABSTRAK

*Wawasan Nusantara adalah konsep yang mengedepankan pemahaman tentang keragaman budaya, geografi, dan sosial-politik Indonesia sebagai dasar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan negara untuk melindungi kepentingan dan integritasnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Konsep wawasan Nusantara menekankan pentingnya pengertian dan kesadaran akan keberagaman dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam konteks otonomi daerah, implementasi wawasan Nusantara menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan di tingkat daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui pendekatan yang memperkuat integrasi nasional, seperti pendidikan multikultural, pengembangan ekonomi berbasis daerah, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, implementasi wawasan Nusantara dalam menjaga keutuhan NKRI di era otonomi daerah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keberagaman tafsir dan pemahaman terkait konsep tersebut di berbagai daerah. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan implementasi yang sukses. Kesimpulannya, Implementasi konsep wawasan Nusantara harus memperkuat integrasi nasional, mengatasi tantangan pemahaman yang beragam, dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan keutuhan negara dan memperkuat posisi sebagai bangsa yang kuat dan maju di panggung internasional.*

**Kata kunci:** Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Keutuhan NKRI

## 1. PENDAHULUAN

Wawasan Nusantara serta ketahanan nasional memainkan peran penting dalam menjaga konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di era otonomi daerah. Wawasan Nusantara adalah pandangan strategis tentang kedaulatan, keutuhan, dan keberlanjutan wilayah NKRI yang multikultural, dimana terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Wawasan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman yang ada. Ketahanan nasional juga menjadi landasan kuat dalam menjaga konsep NKRI. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek, seperti pertahanan militer, keamanan dalam negeri, ekonomi yang kuat, dan stabilitas sosial. Dalam konteks otonomi daerah, implementasi konsep ketahanan nasional sangat relevan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, tantangan muncul dalam mengimplementasikan konsep tersebut di era otonomi daerah. Kebebasan yang diberikan kepada daerah dalam mengelola urusan lokal seringkali menimbulkan perbedaan pendekatan dan prioritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar

konsep NKRI tetap terjaga dan implementasi ketahanan nasional berjalan dengan baik. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan Nusantara dan ketahanan nasional juga menjadi faktor kunci. Edukasi yang baik dan penyebaran informasi yang tepat perlu dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai NKRI dalam kesadaran kolektif masyarakat di seluruh Indonesia.

Globalisasi membawa perubahan-perubahan dan ide-ide baru tentang bagaimana pergaulan antar bangsa dibangun, sehingga tidak jarang terjadi penyerapan nilai sesuai dengan budaya bangsa sendiri. Makna wawasan nasional menyangkut persoalan cara pandang rakyat Indonesia tentang ke-Indonesiannya. Artinya, kesadaran setiap warga negara kebhinekaan: sukunya multientis, agamanya, dan budayanya (aneka adat istiadat: Kebhinekaan ini menimbulkan masalah multikultur) serta masalah dalam kehidupan sehari-hari (masyarakat) dan berkehidupan politik negara. Beragamnya etnis akan menimbulkan sentuhan-sentuhan pergaulan antara etnis yang belum tentu harmonis dan selalu penuh dinamika. Demikian pula beragamnya pengadopsian ataupun pengkultur (budaya) akan ada proses olahan. Kesadaran rakyat Indonesia akan kebhinekaan adalah faktor yang sangat penting, sehingga akan mampu mereduksi berbagai ketegangan yang akan jadi pemicu (*trigger*). Terjadinya tindakan kekerasan massa akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Wawasan nasional suatu bangsa mengandung arti pandangan, tinjauan, atau bahkan tanggapan inderawi untuk mengetahui isi dan arti pengaruh pengaruh tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara. Wawasan nasional suatu bangsa yang merupakan fenomena (gejala) sosial dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karenanya dapat dipelajari atau dikaji, secara spesifik berkaitan dengan pembinaan dan penyelenggaraan ketatanegaraan (politik) dan menganalisis keterkaitannya.

Agar penyelenggaraan kehidupan bangsa selalu mengarah kepada tujuan nasional, diperlukan landasan dan pedoman yang kokoh. Landasan dan pedoman tersebut merupakan rambu cita-cita, rambu yang disusun berdasarkan hubungan dinamis antara ideologi, aspek sosial budaya, kondisi geografi maupun latar belakang kesejahteraannya. Konsep cara pandang tersebut dinamakan wawasan nasional. Karenanya, dalam konsepsi politik wawasan kebangsaan sebagai cara pandang yang mengajarkan bagaimana membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mengejar cita-cita dan tujuan nasional. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tersebut dikenal dengan Wasantara, singkatan dari wawasan nusantara. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, dengan konsep wawasan nusantara untuk bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan seluruh kekayaan alam, sumber daya serta seluruh potensi nasionalnya berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, seimbang, serasi dan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah penghasil secara proporsional dalam keadilan.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus sebagai karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan agama atau kepercayaan, serta golongan, suku, asal usul daerah, berdasarkan status sosialnya. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Hal ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan Negara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konsepsi dan implementasi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dalam menjaga konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era otonomi daerah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan kendala dalam menjaga konsep NKRI di era otonomi daerah serta solusi yang diusulkan untuk meningkatkan implementasi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam upaya memperkuat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah dinamika otonomi daerah. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana konsepsi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional diimplementasikan dalam konteks otonomi daerah.

## 3. ANALISIS DATA

Wawasan nusantara harus menjadi dasar pembangunan daerah. Konsep ketahanan nasional juga harus diintegrasikan dengan otonomi daerah untuk menjaga keutuhan NKRI (Rasyid, 2010:14). Sejalan dengan era globalisasi saat ini yang mengubah cara berpikir masyarakat dunia termasuk Indonesia, yang ditandai dengan adanya *hubungan, integrasi, dan kesalingterkaitan*. Ketiga ciri ini membawa konsekuensi dimana globalisasi menjadi *isme* dunia yang mempengaruhi cara berpikir dan cara melihat bangsa sendiri termasuk terhadap bangsa Indonesia. Budaya massa (*mass culture*) yang diproduksi oleh komunitas tertentu dengan mudahnya menjadi budaya semua bangsa lewat cara publikasi oleh media massa, sehingga dapat menghilangkan identitas suatu bangsa.

Aspek ekonomi dalam konteks Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di semua wilayah Indonesia sangat penting untuk menjaga konsep NKRI. Ini melibatkan pemerataan pembangunan, pengembangan sektor-sektor strategis, dan penguatan konektivitas antarwilayah (Swasono, 2007:52). Dominasi ekonomi yang kuat dari negara-negara maju, membangun kekuatan ekonomi dunia lewat pendirian perusahaan-perusahaan besar yang bisa memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh semua negara dengan pola *Multi National Corporation (MNC)*, dan *Trans National Corporation (TNC)* dengan memaksakan perdagangan bebas (*free trade*), merupakan wujud *isme* globalisasi merasuk ke seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Wawasan nusantara mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Otonomi daerah harus dipahami secara integratif dengan wawasan nusantara untuk menjaga ketahanan nasional (Mas'ud, 2015:19).

Perlunya peraturan hukum yang jelas dan tegas dalam implementasi konsep Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional di era otonomi daerah agar regulasi yang kuat akan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan NKRI (Mahendra, 2010:43). Berkembangnya paham globalisasi menumbuhkan kesadaran baru setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia dimana tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat di daerah-daerah. Sebab, selama hampir 30 tahun (rejim Soeharto) perhatian pembangunan di daerah-daerah belum berlangsung secara merata. Hal ini sejalan dengan konsepsi wawasan nusantara yang disampaikan oleh Juanda (Deklarasi Juanda) salah satunya adalah wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan karenanya, pemerintah saat ini harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap poin ini bahwa wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan harus mengutamakan kesatuan segala aspeknya, tidak semata-mata mengutamakan kepentingan kelompok (partai politik) karena keinginan memperoleh kekuasaan semata-mata. Wawasan nusantara dan konsep ketahanan nasional Indonesia saling

terkait. Otonomi daerah harus mendukung kekuatan nasional dan memperkuat integrasi (Bachtiar, 2013:28).

Rentannya terjadi konflik di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir, yang antara lain menyangkut batas wilayah, pemekaran wilayah, perebutan sumber-sumber ekonomi hingga munculnya pranata kesukuan (*Primordialisme*) yang berlebihan, merupakan bukti bahwa peran pemerintah sedang berada di persimpangan jalan. Wawasan nusantara adalah suatu konsep bagaimana bangsa Indonesia melihat dirinya sendiri yang merupakan negara kepulauan. Wawasan nusantara adalah peta jalan pembangunan Indonesia. Otonomi daerah harus diimplementasikan dengan memperkuat integrasi nasional (Amal, 2011:34). Jika didasarkan hukum yang berlaku pada saat ini, maka Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi perairan teritorial 12 mil, maka selebihnya menjadi wilayah Internasional, situasi demikian membahayakan keamanan nasional dan internasional, karena rawan konflik. Dengan kondisi yang demikian akan membahayakan wilayah nasional atau ketahanan nasional suatu bangsa.

Menghadapi ancaman keamanan dan pertahanan dalam implementasi Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam membangun kapasitas pertahanan, melakukan pengawasan terhadap wilayah perbatasan, dan menghadapi tantangan keamanan baik dari dalam maupun luar negeri (Sukma, 2010:17). Dengan demikian bila dilihat hubungan wawasan nusantara dengan ketahanan nasional adalah bahwa wawasan nusantara memperkuat dan mempermudah pengelolaan ketahanan nasional. Sehingga wawasan nusantara tidak semata-mata dipandang kekuatan maritim, tetapi juga melihat korelasi antar unsur dalam konsepsi wawasan nusantara termasuk pembangunan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wawasan nusantara dapat memperkuat ketahanan nasional. Dalam konteks otonomi daerah, wawasan nusantara harus digunakan sebagai landasan untuk menguatkan kesatuan negara (Syamsuddin & Hadi, 2010:44).

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah merasuknya paham globalisasi dan implementasi otonomi daerah yang berkorelasi dengan semakin bervariasinya konsepsi tentang wawasan nusantara pada masyarakat kita. Pandangan globalisasi yang berimplikasi pada saling keterkaitan, saling keterhubungan antara negara dan warga, menumbuhkan budaya global dan semakin berkurangnya peran negara (*civil society*). Implementasi konsep Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional di era otonomi daerah membutuhkan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Kesepakatan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan nasional serta menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan keutuhan NKRI (Lubis, 2015:43).

wawasan nusantara perlu diperiksa kembali konsep dan implementasinya. Otonomi daerah harus dipahami dalam perspektif wawasan nusantara untuk menjaga integrasi nasional (Ichwan, 2018:33). Banyak kalangan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara bangsa (*nation state*) kini sedang berada di persimpangan jalan. Munculnya banyak tuntutan dari berbagai daerah mulai dari tuntutan pembagian keuangan yang lebih adil, tuntutan otonomi yang lebih luas, tuntutan federalisasi, sampai ke tuntutan kemerdekaan. Akibatnya, eksistensi negara bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan dalam ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (*sebagaimana dinyatakan dalam konsep yang selama ini disebut "wawasan nusantara"*), kemudian dipertanyakan kasahihannya dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kemakmuran yang merata.

#### 4. KESIMPULAN

Bahwa wawasan nusantara sebagai **suatu konsep**, sangat menekankan kesatuan. Meskipun dalam banyak hal, disebutkan pula bahwa ciri-ciri khas daerah diperhatikan, namun esensinya tetap ditujukan dan dibingkaikan dalam "kesatuan" wawasan nusantara.

Bahwa wawasan nusantara mengandung konsepsi yang lebih banyak dan mengedapankan ide kesatuan (*ke-ika-an*) daripada ide kepelbagaian (*ke-bhineka-an*), padahal bangsa Indonesia memiliki banyak budaya lokal yang juga harus eksis. Dalam hal ini, konsep yang seharusnya diakui adalah kepelbagaian daripada konsep kesamaan. Permasalahan daerah memang permasalahan yang *multidimensional*. Karena itu pemecahan masalah yang harus ditempuh haruslah komprehensif dan mencakup cetak biru pembangunan institusi (*institutional development*). Paling tidak dibutuhkan *assessment* menyeluruh terlebih dulu atas penyelenggaraan negara serta kerangka umumpembangunan kelembagaan.

## REFERENSI

- Amal, I. (2011). *Otonomi Daerah dan Integrasi Nasional*. Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, H. W. (2013). *Otonomi Daerah dan Kekuatan Nasional*. Rajawali Press.
- Ichwan, M. N. (2018). *Otonomi Daerah dalam Perspektif Wawasan Nusantara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, T.M. (2015). *HAM dan Pancasila: Berbagai Perspektif*. KPG.
- Mahendra, Y.I. (2010). *Membangun Indonesia: Catatan Harian Pakar Konstitusi*. Penerbit Mizan.
- Mas'ud, A. (2015). *Otonomi Daerah dan Ketahanan Nasional: Perspektif Integratif Wawasan Nusantara*. Kencana.
- Rasyid, R. (2010). *Konsep Ketahanan Nasional dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Pustaka Setia.
- Sukma, R. (2010). *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto*. Routledge.
- Swasono, S.E. (2007). *Pembangunan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah: Dinamika dan Tantangan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsuddin, R., & Hadi, N. (2010). *Wawasan Nusantara, Memperkuat Ketahanan Nasional*. PT RajaGrafindo Persada.